

ANALISIS PENDAPATAN DAN BELANJA PADA PEMERINTAH KOTA BITUNG

oleh:

Julliet Angel Gozaliem

Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Jurusan Akuntansi

Universitas Sam Ratulangi Manado

email: enye_angeljullie@rocketmail.com**ABSTRAK**

Pengelolaan keuangan daerah sangat besar pengaruhnya terhadap nasib suatu daerah karena dapat menjadi daerah mandiri dan mampu mengembangkan potensi daerah sesuai dengan kebutuhan tiap daerah. Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis penerapan anggaran pendapatan dan belanja daerah pada pemerintah Kota Bitung. Jenis data yang digunakan adalah data kuantitatif dan data primer. Metode analisis yang digunakan adalah metode deskriptif yaitu metode yang mengumpulkan, merumuskan dan mengklasifikasi serta menginterpretasikan data yang diperoleh dengan analisis data kuantitatif yang disajikan dalam bentuk angka. Hasil analisis menunjukkan Pemerintah Kota Bitung dalam menggunakan anggaran pendapatan dan belanja dapat dikatakan sangat efektif hal ini terlihat dalam rasio efektifitas pendapatan asli daerah, dan dalam analisis varians juga dapat terlihat bahwa pemerintah daerah sangat efektif dalam menggunakan anggaran pendapatan daerah. Pemerintah Kota Bitung dalam menggunakan anggaran belanja dapat dikatakan tidak efisien hal ini terlihat dalam analisis efisiensi belanja daerah dan analisis varians belanja daerah, begitu pula dengan kemandirian pemerintah dalam melaksanakan anggaran pendapatan daerah pada analisis derajat desentralisasi dan Rasio Ketergantungan daerah yang menunjukkan bahwa pemerintah Kota Bitung masih sangat bergantung pada pihak eksternal.

Kata kunci: *anggaran pendapatan dan belanja daerah, efektifitas, efisiensi.*

ABSTRACT

Financial management is very large influence on the fate of a local area because it can be self-sufficient and able to develop the potential of the area in accordance with the needs of each region. The purpose of this study is to analyze the implementation of the budget revenue and expenditure in the City of Bitung. Type of data used is quantitative data and primary data. Analysis method used is descriptive method is a method that collects, formulate and classify and interpret the data obtained with the quantitative data analysis presented in the form of numbers. Based on the analysis of Bitung City Government in using the budget revenue and expenditure can be said to be very effective as seen in the ratio of the effectiveness of local revenue, and in the analysis of variance can also be seen that the local government is very effective in the use of budget revenue. Bitung City Government in using the budget can be said to be inefficient as seen in the analysis of the efficiency of shopping areas and shopping area variance analysis, as well as the independence of the government in implementing the revenue budget on an analysis of the degree of decentralization and regional dependency ratio which suggests that the government is still Bitung City highly dependent on external parties.

Keywords: *budget revenue and expenditure, the effectiveness, efficiency.*

PENDAHULUAN

Latar Belakang

Perkembangan akuntansi sektor publik, di Indonesia semakin pesat dengan adanya era baru dalam pelaksanaan pengelolaan keuangan daerah. Pengelolaan keuangan daerah sangat besar pengaruhnya terhadap nasib suatu daerah karena daerah dapat menjadi daerah yang mandiri dan mampu mengembangkan potensi daerah sesuai dengan kebutuhan tiap daerah. Pengelolaan daerah yang dilakukan secara ekonomis, efektif dan efisien atau memenuhi *value for money* serta partisipasi, transparansi, akuntabilitas dan keadilan akan mendorong pertumbuhan ekonomi yang selanjutnya mengurangi jumlah pengangguran serta menurunkan tingkat kemiskinan.

Laporan realisasi anggaran merupakan jenis laporan keuangan daerah yang lebih dahulu dihasilkan sebelum kemudian disyaratkan untuk membuat laporan neraca dan laporan arus kas. Anggaran dalam pemerintahan merupakan tulang punggung (*back-bone*) penyelenggaraan pemerintahan. Usaha pemerintah daerah dalam menggali sumber dana yang berasal dari potensi daerah yang dimiliki serta kemampuan mengelola dan memanfaatkan sumber dana yang ada tercermin dalam anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD). Anggaran memiliki peran penting sebagai alat stabilisasi, distribusi, alokasi sumber daya publik, perencanaan dan pengendalian organisasi serta penilaian kinerja. Oleh karena itu laporan realisasi anggaran menjadi salah satu laporan pertanggungjawaban keuangan daerah yang utama.

Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis penerapan anggaran pendapatan dan belanja daerah pada pemerintah Kota Bitung.

TINJAUAN PUSTAKA

Akuntansi

Sabeni dan Gozali (2008:5) menyebutkan bahwa “akuntansi adalah suatu kegiatan jasa yang fungsinya menyediakan data kuantitatif, terutama yang mempunyai sifat keuangan dari suatu kesatuan usaha ekonomi yang dapat digunakan dalam pengambilan keputusan-keputusan ekonomi dalam rangka memilih alternatif-alternatif dari suatu keadaan.

Akuntansi Keuangan Daerah

Pengertian akuntansi keuangan daerah, yaitu suatu proses pengidentifikasian, pengukuran, pencatatan, dan pelaporan transaksi ekonomi (keuangan) dari entitas pemda (kabupaten, kota, atau provinsi) (Halim 2008:36). Akuntansi keuangan daerah diidentifikasi sebagai suatu proses pengidentifikasian, pengukuran, pencatatan dan pelaporan transaksi ekonomi (keuangan) dari entitas pemerintah daerah-pemda (kabupaten, kota, atau provinsi) yang dijadikan sebagai informasi dalam rangka pengambilan keputusan ekonomi oleh pihak-pihak eksternal entitas pemda (Halim 2007:42).

Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD)

APBD adalah suatu rencana operasional keuangan daerah, disatu pihak menggambarkan penerimaan pendapatan dan dilain pihak merupakan pengeluaran untuk membiayai pengeluaran rutin dan pengeluaran pembangunan dalam satu tahun anggaran. APBD juga merupakan instrument yang akan menjamin terciptanya disiplin dalam proses pengambilan keputusan terkait dengan kebijakan pendapatan maupun belanja daerah (Rahardjo, 2011:62).

Pendapatan Daerah dan Belanja Daerah

Standar akuntansi pemerintahan (SAP) mendefinisikan pendapatan sebagai semua penerimaan rekening kas umum negara/daerah yang menambah ekuitas dana lancar dalam periode tahun anggaran bersangkutan yang menjadi hak pemerintah dan tidak perlu dibayar kembali oleh pemerintah. Secara umum pendapatan daerah dapat dipahami sebagai hak pemerintah daerah yang menambah kekayaan bersih yang terjadi akibat transaksi masa lalu. Pendapatan pemerintah daerah berbeda dengan penerimaan daerah. Penerimaan daerah adalah semua jenis penerimaan kas yang masuk ke rekening kas daerah baik yang murni berasal dari pendapatan daerah

maupun dari penerimaan pembiayaan. Belanja daerah dapat didefinisikan sebagai semua pengeluaran dari rekening kas umum daerah yang mengurangi ekuitas dana lancar dalam periode tahun anggaran bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh pemerintah daerah (Mahmudi, 2010). Belanja menurut peraturan pemerintah nomor 71 tahun 2010, adalah semua pengeluaran dari rekening kas umum negara/daerah yang mengurangi ekuitas dana lancar dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh pemerintah. Definisi lainnya, seperti yang di jelaskan dalam peraturan Menteri dalam Negeri No. 13 Tahun 2006, Belanja adalah kewajiban pemerintah daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih. Belanja di lingkungan akuntansi pemerintahan di Indonesia diartikan sebagai semua pengeluaran bendahara umum negara/daerah yang mengurangi ekuitas dana lancar dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan yang tidak akan diperoleh kembali pembayarannya oleh pemerintah (Nordian, 2007).

Analisis Pendapatan dan Belanja Daerah

Analisis pendapatan dan belanja daerah secara umum terlihat dari laporan realisasi anggaran. Melalui laporan realisasi anggaran, kita dapat melakukan analisis pendapatan untuk menilai efektifitas, efisiensi, dan ekonomi dari pendapatan daerah antara lain dengan cara berikut ini.

1. Analisis varians (selisih) anggaran pendapatan
2. Derajat desentralisasi
3. Rasio ketergantungan keuangan daerah
4. Rasio efektifitas PAD
5. Analisis varians belanja
6. Rasio efisiensi belanja

Penelitian Terdahulu

Tabel 1. Penelitian Terdahulu

Nama Peneliti/ Tahun	Judul	Tujuan	Metode Penelitian	Hasil Penelitian	Persamaan	Perbedaan
Ariana (2011)	Analisis pendapatan dan belanja pada pemerintah daerah kabupaten Kutai Timur.	Bertujuan untuk mengetahui tendang nilai efektifitas, efisiensi dan ekonomis dari anggaran pendapatan dan belanja pada pemerintah daerah kabupaten Kutai Timur.	Menggunakan alat analisis yaitu, analisis varians pendapatan, derajat destranlisasi, rasio ketergantungan keuangan daerah, rasio efektifitas PAD, analisis varians belanja, dan rasio efisiensi belanja.	Pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja daerah secara efektif, efisiensi dan ekonomis telah dilaksanakan dengan baik sesuai dengan karakteristik yang ada pada alat analisis.	Peneliti sebelumnya menggunakan alat analisis yang sama yaitu, analisis varians pendapatan, derajat destranlisasi, rasio ketergantungan keuangan daerah, rasio efektifitas PAD, analisis varians belanja, dan rasio efisiensi belanja.	Pelitan sebelumnya di kabupaten kutai Timur sedangkan yang sekarang di Pemerintah kota Bitung.
Jafril (2009)	Analisis belanja pada anggaran pendapatan belanja daerah pemerintah Kabupaten Agam.	Untuk mengukur apakah pemerintah daerah telah menggunakan APBD secara ekonomis, efektif dan efisiensi.	Alat analisis yang digunakan analisis belanja varians, analisis pertumbuhan belanja, analisis keserasian belanja, dan analisis belanja berfungsi.	Penelitian yang dilakukan pemerintah Kabupaten Agam selalu melakukan penghematan terhadap penggunaan dana dari anggaran APBD. Ini menunjukkan adanya usaha pemda tersebut melakukan tindakan efisiensi. Namun secara keseluruhan, belanja yang dikeluarkan pemda tersebut bertambah setiap tahun.	Penelitian sekarang menggunakan analisis belanja varians, dan bertujuan apakah pemerintah daerah telah menggunakan APBD secara ekonomis, efektif, dan efisien.	Penelitian sekarang tidak menggunakan analisis pertumbuhan belanja, analisis keserasian belanja, dan analisis belanja berfungsi.

METODE PENELITIAN

Jenis Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif, yaitu dengan cara mengumpulkan, mengklasifikasikan, menganalisis, dan menginterpretasikan data-data yang diperoleh dari perusahaan/instansi sehingga dapat memberikan gambaran dengan keadaan yang sebenarnya (Arikunto, 2010:234).

Tempat dan Waktu Penelitian

Tempat penelitian dalam penelitian ini adalah pemerintah Kota Bitung, dan waktu penelitian yaitu dimulai pada bulan Juli tahun 2013.

Pengumpulan Data

Jenis Data

Data merupakan sekumpulan informasi yang diperlukan untuk pengambilan keputusan. Adapun jenis data menurut Kuncoro (2009:145) adalah sebagai berikut.

1. Data kuantitatif adalah data yang diukur dengan suatu skala numerik (angka).
2. Data kualitatif adalah data yang tidak dapat diukur dalam skala numerik. Namun karena dalam statistik semua data harus dalam bentuk angka, maka data kualitatif umumnya dikuantitatifkan agar data dapat diproses lebih lanjut.

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data kuantitatif yaitu data realisasi anggaran pemerintah Kota Bitung Periode 2010 - 2012.

Sumber Data

Sumber data penelitian mempengaruhi dalam proses penelitian. Sumber data penelitian dibagi dua yaitu sebagai berikut.

1. Data primer adalah data yang diperoleh dengan survei lapangan yang menggunakan semua metode pengumpulan data ordinal (Kuncoro 2009:145).
2. Data sekunder adalah data yang telah dikumpulkan oleh pengumpulan data dan dipublikasikan kepada masyarakat pengguna data (Kuncoro 2009:145).

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer.

Metode Pengumpulan data

Metode yang digunakan oleh penulis dalam mengumpulkan data untuk penelitian ini adalah dengan cara sebagai berikut.

1. Studi lapangan, dengan melakukan observasi lapangan ke tempat penelitian untuk memperoleh data dan mengetahui lebih jelas mengenai masalah yang diteliti.
2. Studi dokumentasi, dilakukan dengan melakukan penelusuran dokumen-dokumen yang mengandung penelitian yang berupa buku-buku yang berkaitan dengan materi yang dibahas dengan penelitian ini selain itu juga melalui dokumen berupa undang-undang dan peraturan pemerintah.

Metode Analisis

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah Metode Deskriptif yaitu metode yang mengumpulkan, merumuskan dan mengklasifikasi serta menginterpretasikan data yang diperoleh dengan analisis data kuantitatif yang disajikan dalam bentuk angka yaitu yang berkaitan dengan analisis varians pendapatan, derajat desentralisasi, rasio ketergantungan keuangan daerah, rasio efektivitas pendapatan asli daerah, analisis varians belanja dan rasio efisiensi belanja untuk tahun 2010 sampai dengan tahun 2012, sehingga menghasilkan gambaran yang jelas tentang kondisi keuangan daerah.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**Hasil Penelitian****Analisis Varians Pendapatan**

Analisis varians anggaran pendapatan dilakukan dengan cara menghitung selisih antara realisasi pendapatan dengan yang dianggarkan.

Tabel 2. Analisis Varians Pendapatan Tahun 2010 - 2012

Uraian	Tahun 2010			Tahun 2011			Tahun 2012		
	Anggaran (Dalam Jutaan)	Realisasi (Dalam Jutaan)	Hasil (%)	Anggaran (Dalam Jutaan)	Realisasi (Dalam Jutaan)	Hasil (%)	Anggaran (Dalam Jutaan)	Realisasi (Dalam Jutaan)	Hasil (%)
PENDAPATAN	448.958,00	446.819,85	99,52	487.359,00	490.636,63	100,67	543.661,00	555.570,59	102,19
PENDAPATAN ASLI DAERAH	19.896,00	18.763,85	94	23.225,00	25.394,63	109	30.453,00	38.435,59	126
Pendapatan Pajak Daerah	6.344,00	7.914,00	125	11.277,00	15.419,00	137	14.460,00	17.723,00	123
Pendapatan Retribusi Daerah	5.562,00	4.989,00	90	4.380,00	4.442,00	101	8.388,00	12.447,00	148
Pendapatan Hasil	1.164,00	1.164,00	100	2.137,00	2.137,00	100	2.348,00	2.348,00	100
Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan									
Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	6.826,00	4.695,85	69	5.429,00	3.394,63	62,5	5.255,00	5.915,59	113
DANA	407.891,00	406.552,00	100	443.496,00	353.630,00	79,7	513.208,00	517.135,00	101
PERIMBANGAN/PENDAPATAN TRANSFER									
Transfer Pemerintah Pusat - Dana Perimbangan	328.596,00	327.481,00	100	354.952,00	353.630,00	99,6	437.309,00	440.111,00	101
Dana Bagi Hasil Pajak	28.160,00	27.156,00	96	22.160,00	20.826,00	94	24.660,00	25.678,00	104
Dana Bagi Hasil Bukan Pajak (Sumber Daya Alam)	339	228	67	339	351	104	339	2.122,00	625
Dana Alokasi Umum	274.296,00	274.296,00	100	304.453,00	304.453,00	100	379.300,00	379.300,00	100
Dana Alokasi Khusus	25.800,00	25.800,00	100	27.999,00	27.999,00	100	33.009,00	33.009,00	100
Transfer Pemerintah Pusat – Lainnya	67.039,00	66.472,00	99	74.487,00	74.617,00	100	57.842,00	57.842,00	100
Dana Otonomi Khusus							0	0	
Dana Penyesuaian	67.039,00	66.472,00	99	74.487,00	7.461,00	100	57.842,00	57.842,00	100
Transfer Pemerintah Provinsi	12.256,00	12.597,00	103	14.056,00	16.355,00	116	18.055,00	19.181,00	106
Pendapatan Bagi Hasil Pajak	12.256,00	12.597,00	103	14.056,00	16.355,00	116	18.055,00	19.181,00	106
Pendapatan Bagi Hasil Lainnya									
LAIN-LAIN PENDAPATAN YANG SAH	21.170,00	21.503,00	102	20.638,00	20.638,00	100	0	0	0
Pendapatan Hibah	0	0		442	442		0	0	0
Pendapatan Lainnya	2.170,00	21.503,00	991	20.195,00	20.195,00	100			

Sumber: Olahan Data Laporan Realisasi Anggaran Kota Bitung, Tahun 2013

Analisis varians anggaran pendapatan pada Pemerintah Kota Bitung belum dapat terlaksana dengan baik karena realisasi meningkat setiap tahun melebihi yang dianggarkan. Hasil perhitungan varians pendapatan terdapat selisih anggaran pendapatan dengan realisasi yang bersaldo negatif pada tahun 2010 sebesar 99,52% dari total APBD. Pada tahun 2011 selisih anggaran pendapatan bersaldo positif sebesar 100,67%, sedangkan pada tahun 2012 jumlah realisasi pendapatan yang dianggarkan meningkat menjadi 102,19% dari total APBD.

Derajat Desentralisasi

Derajat desentralisasi dihitung berdasarkan perbandingan antara jumlah pendapatan asli daerah dengan total penerimaan daerah. Rasio ini menunjukkan derajat kontribusi PAD terhadap total penerimaan daerah.

$$\text{Derajat desentralisasi} = \frac{\text{pendapatan asli daerah}}{\text{total pendapatan daerah}} \times 100\% \quad (\text{Ariana, 2011})$$

$$\text{Derajat desentralisasi Tahun 2010} = \frac{18.763.528.960,85}{446.819.398.413,85} \times 100\% \\ = 4\%$$

$$\text{Derajat desentralisasi Tahun 2011} = \frac{25.394.063.796,63}{490.636.327.652,63} \times 100\% \\ = 5\%$$

$$\text{Derajat desentralisasi Tahun 2012} = \frac{38.435.120.911,59}{555.570.392.064,59} \times 100\% \\ = 7\%$$

Rasio Ketergantungan Keuangan Daerah

Rasio ketergantungan keuangan daerah dihitung dengan cara membandingkan jumlah pendapatan transfer yang diterima oleh pemerintah daerah dengan total penerimaan daerah (Ariana, 2011).

$$\text{Rasio ketergantungan keuangan daerah} = \frac{\text{pendapatan transfer}}{\text{total pendapatan daerah}} \times 100\%$$

$$\text{Rasio ketergantungan keuangan daerah 2010} = \frac{406.552.501.953,00}{446.819.398.413,85} \times 100\% \\ = 91\%$$

$$\text{Rasio ketergantungan keuangan daerah 2011} = \frac{353.630.749.839,00}{490.636.327.652,63} \times 100\% \\ = 72\%$$

$$\text{Rasio ketergantungan keuangan daerah 2012} = \frac{517.135.271.153,00}{555.570.392.064,59} \times 100\% \\ = 93\%$$

Rasio Efektivitas Pendapatan Asli Daerah

Rasio efektivitas pendapatan asli daerah dihitung dengan cara membandingkan realisasi penerimaan pendapatan asli daerah yang dianggarkan, (Halim, 2007).

$$\text{Rasio efektivitas PAD} = \frac{\text{realisasi penerimaan PAD}}{\text{target penerimaan PAD}} \times 100\%$$

$$\text{Rasio efektivitas PAD 2010} = \frac{18.763.528.960,85}{19.896.926.587,00} \times 100\% \\ = 94\%$$

$$\text{Rasio efektivitas PAD 2011} = \frac{25.394.063.796,63}{23.225.000.000,00} \times 100\% \\ = 109\%$$

$$\text{Rasio efektivitas PAD 2012} = \frac{38.435.120.911,59}{30.453.039.269,00} \times 100\% \\ = 126\%$$

Analisis Varians Belanja

Analisis varians merupakan analisis perbedaan/selisih antara realisasi belanja dengan anggaran.

Tabel 3. Analisis Varians Belanja Tahun 2010 – 2012

Uraian	Tahun 2010			Tahun 2011			Tahun 2012		
	Anggaran (Dalam Jutaan)	Realisasi (Dalam Jutaan)	Hasil (%)	Anggaran (Dalam Jutaan)	Realisasi (Dalam Jutaan)	Hasil (%)	Anggaran (Dalam Jutaan)	Realisasi (Dalam Jutaan)	Hasil (%)
Belanja	476.707,43	459.724,00	96	498.831,28	483.991,00	97	559.008,91	538.645,00	96,4
Belanja Operasi	354.473,43	343.331,00		392.018,45	380.005,00	96,9			
Belanja Pegawai	268.070,43	258.050,00	96	299.250,45	289.548,00	96,8	426.139,91	409.011,00	96
Belanja Barang	61.401,00	60.295,00	98	69.386,00	67.781,00	97,7	330.290,91	315.651,00	95,6
Belanja Bunga	25.200,00	252	100	197	157	79,7	87.053,00	84.872,00	97,5
Belanja Hibah	13.600,00	13.584,00	100	13.609,00	13.020,00	95,7	160	97	61
Belanja Bantuan Sosial	11.150,00	11.148,00	100	9.575,00	9.497,00	99,2	8.130,00	7.980,00	98,2
BELANJA MODAL	119.413,00	113.573,00		105.887,83	103.257,00		30	0	0
Belanja Tanah							474	4.094,00	86,2
Belanja Peralatan dan Mesin									
Belanja Bangunan dan Gedung							132.353,00	129.165,00	97,6
Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan							12.112,00	9.909,00	81,8
Belanja Aset Tetap Lainnya							19.677,00	19.368,00	98,4
Belanja Tak Terduga	2.820,00	2.819,00	100	925	729	78,8	29.352,00	28.941,00	98,6
Belanja Tak Terduga	2.820,00	2.819,00		925	729		70.105,00	69.891,00	99,7
Surplus / (Defisit)	-27.749	-12.904	47	-1.147,28	6.644,63	-58	1.104,00	1.055,00	95,6
							516	468	90,8
							516	468	90,8
Pembiayaan							-15.347,91	16.924,59	-110
Penerimaan Daerah	119.375,43	127.334,43		14.664,28	14.645,28				
Penggunaan Sisa Lebih									
Perhitungan Anggaran (SiLPA)	29.375,43	28.972,43	99	14.554,23	145.541,28	100			
Penerimaan Kembali		111		110	91				
Pemberian Pinjaman									
Penerimaan Kembali Investasi	90.000,00	98.250,00	109				18.217,91	18.227,91	100
Jangka Pendek dalam Bentuk Deposito							18.097,91	18.097,91	100
Pengeluaran Daerah	91.600,00	99.876,00	109	3.192,00	3.192,00	100	120	130	109
Penyertaan Modal (Investasi)	700	700	100	2.250,00	2.250,00	100			
Pemerintah Daerah									
Pembayaran Pokok Utang	900	926	100	942	942	100	2.870,00	2.860,00	99,7
Investasi Jangka Pendek dalam Bentuk Deposito	90.000,00	98.250,00	109	0	0		2.250,00	2.250,00	100
							620	610	98,4
Pad/Dana Perimbangan	0,048	0,046	95	0,052	0,071	137			
Total Belanja/Total Pendapatan	1,06	1,03	97	1,02	0,99	96,4	15.347,91	15.367,91	100
Belanja Pegawai/Total Belanja	0,562	0,561	100	0,599	0,599	100			
Belanja Pegawai/Pendapatan Daerah	13,47	13,75	102	12,88	11,4	88,5	0	32.292,50	0

Sumber: Olahan Data Dari Laporan Realisasi Anggaran

Analisis varians belanja pada Pemerintah Kota Bitung telah melaksanakan penghematan belanja di tiap tahunnya dapat dikatakan baik karena realisasi tidak melebihi yang dianggarkan. Hasil perhitungan analisis varians belanja berdasarkan laporan realisasi anggaran tahun 2010 selisih anggaran belanja bersaldo negatif sebesar 96% dari total APBD dan pada tahun 2011 sebesar 97%, sedangkan pada tahun 2012 sebesar 96,4% dari total APBD.

Analisis Efisiensi Belanja

Rasio efisiensi belanja merupakan perbandingan antara realisasi belanja dengan anggaran belanja, (Halim, 2007):

$$\text{Rasio efisiensi belanja} = \frac{\text{realisasi belanja}}{\text{anggaran belanja}} \times 100\%$$

$$\begin{aligned}\text{Rasio efisiensi belanja 2010} &= \frac{459.724.036.794,00}{476.707.940.392,43} \times 100\% \\ &= 96\% \\ \text{Rasio efisiensi belanja 2011} &= \frac{483.991.924.455,00}{498.831.311.058,28} \times 100\% \\ &= 97\% \\ \text{Rasio efisiensi belanja 2012} &= \frac{538.645.556.073,00}{559.008.942.280,91} \times 100 \\ &= 96\%\end{aligned}$$

Tabel 4. Perbandingan Rasio Pada Pemerintah Kota Bitung Tahun 2010-2012

JENIS RASIO	TAHUN		
	2010	2011	2012
Analisis Varians Anggaran Pendapatan	99,52%	100,67%	102,19%
Derajat Desentralisasi	4%	5%	7%
Rasio Ketergantungan keuangan daerah	91%	72%	93%
Rasio Efektivitas Pendapatan Asli Daerah	94%	109%	126%
Analisis Varians Belanja	96%	97%	96,4%
Rasio Efisiensi Belanja	96%	97%	96%

Sumber: Olahan Data Laporan Realisasi Anggaran Kota Bitung, Tahun 2013

Berdasarkan hasil perhitungan yang terdapat diatas maka penulis menyimpulkan bahwa keenam rasio yang digunakan diatas menunjukan kenaikan disetiap tahun. Ini memberikan gambaran bahwa pemerintah Kota Bitung dalam melaksanakan APBD sudah sangat efektif tetapi belum efisien.

Pembahasan

Dari hasil analisis diatas, maka diberikan uraian yang tertuang dalam pembahasan hasil analisis realisasi anggaran pendapatan dan belanja daerah tahun anggaran 2010-2012 pemerintah Kota Bitung sebagai berikut:

1. Analisis Varians Pendapatan

Laporan realisasi anggaran diatas, pada tahun 2010 secara umum terdapat selisih anggaran pendapatan dengan realisasi yang bersaldo negatif. Hal ini mengindikasikan bahwa kinerja pendapatan yang cukup baik walaupun masih belum mampu memperoleh pendapatan yang sesuai dengan jumlah yang dianggarkan. Selisih anggaran pendapatan yang dapat terealisasi pada tahun 2010 sebesar Rp.2.139.442.975,15 atau sebesar 99,52% dari total APBD. Jumlah realisasi tersebut jika dilihat dari nominalnya memang tidak begitu besar, namun jika dilihat nilai persentasinya cukup signifikan. Meskipun secara nominal cukup besar, tetapi jika secara persentasi cukup signifikan, maka dapat dikatakan kinerjanya baik dan memiliki tingkat efektifitas yang baik. hal ini terlihat dari perbandingan realisasi penerimaan pendapatan dengan target penerimaan pendapatan sebesar 99,52%. Pada tahun 2011 terjadi perubahan yang cukup signifikan. Pada tahun 2011 selisih anggaran pendapatan bersaldo positif.

Hal ini mengindikasikan bahwa kinerja pendapatan sangat baik dan sangat efektif. Selisih anggaran pendapatan yang dapat terealisasi pada tahun 2011 sebesar Rp.3.276.368.191,63 atau sebesar 100,67% dari total APBD. Realisasi pendapatan pada tahun 2012 melebihi jumlah yang dianggarkan yaitu sebesar Rp.11.909.002.153,59 atau 102,19% dari total APBD. Hal ini dikarenakan meningkatnya pendapatan transfer yang diperoleh pemerintah daerah Kota Bitung. Selisih realisasi ini merupakan selisih yang diharapkan (*favorable variance*) oleh pemerintah daerah.

2. Derajat Desentralisasi

Derajat desentralisasi pada pemerintah Kota Bitung pada tahun anggaran 2010 sebesar 4%, dan pada tahun 2011 sebesar 5% sedangkan pada tahun anggaran 2012 sebesar 7%. Dari perhitungan tersebut dapat kita ketahui bahwa derajat desentralisasi pemerintah Kota Bitung mengalami kenaikan disetiap tahunnya, maka semakin naik pula kemampuan pemerintah dalam penyelenggaraan desentralisasi.

3. Rasio Ketergantungan Keuangan Daerah

Rasio ketergantungan keuangan daerah pada tahun 2010 sebesar 91%, tahun 2011 sebesar 72% dan tahun 2012 sebesar 93%. Dari perhitungan tersebut dapat diketahui bahwa pada tahun 2010 pemerintah dalam melaksanakan kegiatannya masih sangat bergantung terhadap pemerintah pusat/propinsi. Namun pada tahun 2011 rasio ketergantungan keuangan daerah mulai menurun menjadi 72% karena meningkatnya total pendapatan daerah menjadi Rp.490.636.327.652,63, dan pada tahun 2012 rasio ketergantungan keuangan daerah kembali meningkat sebesar 93% itu artinya pemerintah kota Bitung masih sangat bergantung pada Pemerintah pusat/provinsi.

4. Rasio Efektivitas Pendapatan Asli Daerah

Rasio efektivitas PAD pada tahun anggaran 2010 sebesar 94% dapat dikatakan efektif karena berada pada predikat 90%-100%. Jika dibandingkan tahun 2011 dan 2012 kemampuan daerah dalam menjalankan tugasnya mengalami peningkatan menjadi 109% dan 126%, hal ini terjadi karena perbandingan jumlah antara target anggaran dan realisasinya terlalu jauh perbedaannya yaitu sebesar Rp.3.276.368.191,63 (Rp.487.359.959.461,00 – Rp.490.636.327.652,63) dan pada tahun 2012 Rp11.909.002.153,59 (Rp.543.661.389.911,00 – Rp. 555.570.392.064,59). Dampak positif perhitungan rasio efektivitas PAD ini bagi keuangan yaitu dari perhitungan analisis rasionya dapat diketahui dengan cermat bagaimana perbandingan antara target dan realisasi PAD pada tiap tahunnya sehingga dapat dinilai oleh pemerintah Kota Bitung kapan target dan realisasinya ini berada diposisi sangat efektif bagi keuangan daerahnya.

5. Analisis Varians Belanja

Laporan realisasi anggaran tahun 2010, secara umum terdapat selisih anggaran belanja bersaldo negatif. Hal ini mengindikasikan adanya efisiensi atau penghematan anggaran. Anggaran belanja terserap 96,44%, penghematan anggaran belanja yang dilakukan dalam tahun 2010 sebesar Rp.16.933.903.598,43 dari total APBD. Jumlah penghematan tersebut jika dilihat dari persentasenya memang tidak begitu besar namun jika dilihat dari nominalnya cukup signifikan dan dapat dikatakan pemerintah kota Bitung memiliki kinerja yang cukup baik dalam penghematan anggaran belanja. Hal ini cukup berbeda pada laporan realisasi anggaran tahun 2011. Pada tahun ini persentase efisiensi atau penghematan anggaran cukup meningkat sebesar 97,03%. Penghematan belanja pada tahun 2011 sebesar Rp.14.839.386.603,28 dari total APBD. Sedangkan pada tahun 2012 presentasi efisiensi atau pengehematan anggaran menurun menjadi sebesar 96,36%. Penghematann belanja pada tahun 2012 sebesar Rp.20.363.386.207,91. Dalam analisis ini hendaknya tidak terpaku pada persentase pengehematan yang berhasil dilakukan tetapi juga jumlah nominalnya. Meskipun secara persentase kecil, tetapi jika cukup signifikan, maka dapat dikatakan kinerjanya baik.

6. Rasio Efisiensi Belanja

Rasio efisiensi belanja pada tahun 2010 sebesar 96% hal ini mengindikasikan bahwa pada tahun ini pemerintah telah melakukan efisiensi anggaran belanja sedangkan pada tahun 2011 pemerintah mengalami penurunan dalam hal efisiensi anggaran belanja hal ini dapat dilihat dengan meningkatnya persentase dari perhitungan analisis rasio anggaran belanja sebesar 97%, namun di tahun 2012 pemerintah mengalami kenaikan dalam hal efisiensi anggaran belanja hal ini dapat di lihat dengan menurunnya presentase dari perhitungan rasio anggaran belanja sebesar 96%. Hal ini dikarenakan karena selisih antara anggaran dan realisasi belanja tidak jauh berbeda. Kinerja pemerintah daerah dinilai baik apabila pemerintah daerah mampu melakukan efisiensi belanja. Sebaliknya jika realisasi belanja lebih besar dari jumlah yang dianggarkan maka hal itu mengindikasikan adanya kinerja anggaran yang kurang baik.

PENUTUP

Kesimpulan

Hasil analisis dan pembahasan mengenai analisis pendapatan dan belanja pada pemerintah Kota Bitung diambil kesimpulan yaitu dalam analisis varians anggaran pendapatan belum dapat terlaksana dengan baik karena realisasi meningkat setiap tahun melebihi yang dianggarkan. Derajat desentralisasi mengalami kenaikan disetiap tahunnya maka semakin naik pula kemampuan pemerintah dalam menyelenggarakan desentralisasi. Rasio ketergantungan keuangan daerah masih sangat bergantung pada pemerintah pusat. Dari hasil perhitungan perbandingan antara target dan realisasi PAD mengalami kenaikan disetiap tahun maka rasio efektifitas PAD berada pada posisi sangat efektif. Analisis varians belanja telah melaksanakan penghematan belanja di tiap tahunnya dapat dikatakan baik karena realisasi tidak melebihi yang dianggarkan. Rasio efisiensi belanja belum efisien karena hasil yang diperoleh belum sesuai dengan hasil yang diinginkan.

Saran

Saran yang dapat penulis sampaikan, adalah:

1. Adanya perhitungan pendapatan dan belanja daerah yang telah dianalisis, diharapkan pemerintah daerah dapat lebih melaksanakan anggaran secara efisien, dan ekonomis.
2. Adanya perhitungan rasio-rasio keuangan daerah yang telah dianalisis maka, diharapkan pemerintah daerah dapat lebih memperhatikan kecenderungan yang terjadi sebagai bahan pertimbangan didalam pengambilan keputusan pada waktu yang akan datang.

DAFTAR PUSTAKA

- Arikunto. 2010. *Manajemen Penelitian*. Edisi kesebelas. PT. Rineka. Jakarta.
- Ariana, Hermawati. 2011. Analisis Pendapatan dan Belanja Pada Pemerintah Daerah Kabupaten Kutai Timur. *Skripsi*. Universitas Mulawarman. Kabupaten Kutai Timur.
http://journal.feunmul.in/ojs/index/php/publikasi_ilmiah/article/view/77/72. diakses 23 Oktober 2012.
- Halim, Abdul. 2007. *Akuntansi Sektor Publik - Akuntansi Keuangan Daerah*. Salemba Empat. Jakarta.
- Halim, Abdul. 2008. *Akuntansi Sektor Publik - Akuntansi Keuangan Daerah*. Salemba Empat. Jakarta.
- Jafril. 2009. Analisis Belanja Pada Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Pemerintah Kabupaten Agam. *Skripsi*. Universitas Andalas. Padang. <http://repository.unand.ac.id/12332/>. diakses 11 April 2011.
- Kuncoro, Mudrajat. 2009. *Metode Riset untuk Bisnis & Ekonomi*. Erlangga. Jakarta.
- Mahmudi. 2010. *Analisis Laporan Keuangan Pemerintah Daerah*. Edisi ke-2. UPP STIM YKPN. Yogyakarta.
- Nordiawan, Deddi. 2007. *Akuntansi Pemerintahan*. Salemba Empat. Jakarta.
- Rahardjo, Adisasmita. 2011. *Pengelolaan Pendapatan dan Anggaran Daerah*. Graha Ilmu. Yogyakarta.
- Republik Indonesia. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 *Tentang Standar Akuntansi Pemerintahan*. Jakarta.
- _____. Peraturan Menteri dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2006 *Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah*. Jakarta.
- Sabeni, Arifin., Ghozali, Imam. 2008. *Pokok-pokok Akuntansi Pemerintah*. BPFE. Yogyakarta.